

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari uraian program dan kegiatan DAK pada Dinas Kehutanan Pasaman Barat maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi program dan kegiatan DAK pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat belum sepenuhnya berjalan dengan baik, masih terdapat kendala dalam penyusunan dan pengimplementasiannya. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya sasaran yang ada didalam juknis DAK yang tidak dilaksanakan sebesar 40% dan hanya 60% yang sudah dilaksanakan. Selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 Dinas Kehutanan sudah melaksanakan 16 kegiatan DAK dari total seluruh kegiatan sebanyak 39 kegiatan. Kegiatan DAK tersebut diarahkan pada rehabilitasi hutan dan lahan serta penyediaan sarana prasarana penyuluh kehutanan dan pengamanan hutan. Untuk peningkatan penyediaan sarana dan prasarana bidang kehutanan di Kabupaten Pasaman Barat, tahun 2013 sampai dengan 2015 realisasinya sudah mencapai 100%. Untuk rehabilitasi hutan dan lahan realisasinya tahun 2013 sebesar 78,94%, tahun 2014 hanya 53,42% dan tahun 2015 sebesar 67,44 %. Hal ini, disebabkan lemahnya pengawasan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan terhadap pelaksanaan kegiatan.
2. Permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yaitu:

Kompetensi yang dimiliki oleh tenaga perencana masih kurang. Kompetensi yang dibutuhkan tidak hanya memiliki kompetensi dibidang anggaran namun juga dalam hal teknis terkait dengan program dan kegiatan DAK bidang kehutanan. Dalam penyusunan program dan kegiatan DAK tidak hanya mengacu pada peraturan penyusunan APBD namun juga harus memperhatikan Juknis DAK serta PMK yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan tentang alokasi DAK.

Jumlah sumber daya manusia yang terbatas, kondisi ini dilihat dari jumlah aparatur yang dimiliki baik itu pegawai struktural maupun pegawai fungsional seperti penyuluh kehutanan dan polisi kehutanan yang masih jauh dari kebutuhan seharusnya. Kondisi ini tentu saja menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan DAK pada Dinas Kehutanan.

Rasa tanggungjawab dalam melaksanakan program dan kegiatan yang masih rendah. Kondisi ini terlihat dari kurangnya kesadaran dari pelaksana kegiatan dalam penyiapan laporan tahunan kegiatan, yang seharusnya disusun untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

Belum terbentuknya kelembagaan KPHL/KPHP yang merupakan salah satu dari sasaran DAK yaitu untuk mendorong operasionalisasi KPHL/KPHP tidak dapat direalisasikan. Kondisi ini belum ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah walaupun sudah diusulkan oleh Dinas Kehutanan melalui bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah.

Output yang digunakan tidak sesuai dengan sasaran yang diatur didalam juknis, dimana pengadaan yang seharusnya untuk memenuhi sarana dan

prasarana dari penyuluh kehutanan dan polisi kehutanan, tetapi pada kenyataannya sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan kantor Dinas Kehutanan yang tidak terkait dengan penyuluh kehutanan dan polisi kehutanan. Ini tentu saja tidak sesuai dengan sasaran yang diharapkan didalam juknis

Peran serta dan minat masyarakat yang rendah terhadap program dan kegiatan kehutanan. Hal ini terlihat dari banyak kegiatan yang mengalami kegagalan terutama kegiatan yang melibatkan masyarakat. Situasi ini juga didukung oleh kurangnya tenaga penyuluh kehutanan yang menyebabkan kegiatan penyuluhan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap hutan masih sangat rendah.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan DAK antara lain:

Sumber daya manusia merupakan faktor yang mempengaruhi baik dalam penyusunan maupun pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam penyusunan program dan kegiatan sumber daya manusia yang di beri tugas haruslah memiliki kompetensi yang baik, baik mengenai tata cara penyusunan anggaran maupun dalam aturan teknis terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dianggarkan. Dalam pelaksanaan kegiatan, sumber daya manusia juga memiliki peranan yang sangat penting, terutama penyuluh kehutanan dan polisi kehutanan yang merupakan ujung tombak dari keberhasilan program dan kegiatan DAK kehutanan. Oleh karena itu jumlah dari personil polisi kehutanan dan penyuluh kehutanan harus ditingkatkan.

Sarana dan prasarana merupakan alat yang digunakan untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Sarana prasarana merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang membantu kinerja dari penyuluh kehutanan dan polisi kehutanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Regulasi pemerintah, regulasi pemerintah memiliki pengaruh yang besar dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan DAK bidang kehutanan. Terutama regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan berupa petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan kegiatan DAK. Walaupun demikian, dalam hal penyusunan program dan kegiatan tidak hanya memperhatikan juknis semata tetapi juga memperhatikan aturan-aturan lain yang terkait termasuk peraturan dalam penyusunan APBD, karena DAK merupakan bagian APBD Dinas Kehutanan dan mengikuti mekanisme penyusunan APBD sesuai dengan aturan/ regulasi yang ada.

Masyarakat, dalam pelaksanaan kegiatan DAK, masyarakat memiliki peran yang cukup besar terutama terkait dengan program rehabilitasi hutan dan lahan. Kegiatan-kegiatan ini melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya. Dalam bentuk swakelola berupa perjanjian kerja sama antara kelompok tani/ kelompok kerja dengan Dinas Kehutanan. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan, serta tingkat keberhasilan dari program dalam jangka panjang sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam menjaga pohon yang sudah ditanam. Keterbatasan dana dan sumber daya menyebabkan pemerintah hanya melakukan pemeliharaan selama 2 tahun berturut-turut terhadap tanaman yang sudah ditanam. Pemeliharaan

selanjutnya sangat bergantung pada kepedulian dan partisipasi masyarakat sekitar kawasan hutan dalam menjaganya.

## 5.2 Saran

Agar program dan kegiatan DAK dimasa yang akan datang dapat diimplementasikan dengan baik, maka ada beberapa hal yang perlu disarankan yaitu:

1. Pemerintah daerah harus segera mencari solusi terkait dengan masih kurangnya personil yang ada pada Dinas Kehutanan Pasaman Barat terutama personil tenaga pengawas, penyuluh kehutanan dan polisi kehutanan.
2. Dinas Kehutanan harus lebih meningkatkan kompetensi aparaturnya melalui pelatihan-pelatihan teknis terutama terkait dengan tenaga perencana. Pemerintah daerah harus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada Dinas Kehutanan agar pelayanan kepada masyarakat lebih meningkat dimasa yang akan datang. Dinas Kehutanan juga harus memberikan sanksi yang tegas kepada aparatur yang lalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, agar memberikan efek jera kepada yang bersangkutan. Pemerintah daerah harus mendukung dan memfasilitasi upaya yang dilakukan Dinas Kehutanan dalam membentuk KPHP/KPHL. Pimpinan/ Kepala Dinas seharusnya membuat kebijakan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diharapkan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana DAK dan juga harus mengutamakan kegiatan-kegiatan yang mensejahterakan masyarakat serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya hutan bagi kehidupan dan bagaimana cara memanfaatkan hutan tanpa merusaknya.



3. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan DAK dengan cara sebagai berikut: 1) sumber daya manusia dengan cara meningkatkan kompetensi dari aparatur yang ada serta berusaha memenuhi kebutuhan aparatur pada Dinas Kehutanan; 2) sarana dan prasarana yaitu dengan jalan melakukan pengadaan untuk sarana prasarana yang dibutuhkan serta pemeliharaan terhadap sarana prasarana yang masih bagus serta pemanfaatan sesuai dengan tujuan dari pengadaan sarana dan prasarana; 3) regulasi pemerintah artinya pemerintah daerah harus memperhatikan dan mempedomani peraturan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku; 4) masyarakat harus diberikan sosialisasi dan penyuluhan sehingga kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memelihara, menjaga serta melestarikan hutan menjadi lebih meningkat.

